



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Februari 2021/Periodik - 2020)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN MALANG  
**UNIT KERJA** : SEKRETARIAT DAERAH

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **SUTRISNO**
2. Jabatan : **KEPALA BAGIAN**
3. NHK : **172452**

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 1.276.900.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m2/68 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. Tanah Seluas 5920 m2 di KAB / KOTA NGAWI, WARISAN Rp. 177.000.000
3. Tanah Seluas 1830 m2 di KAB / KOTA NGAWI, WARISAN Rp. 54.900.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 76 m2/76 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
5. Tanah Seluas 9581 m2 di KAB / KOTA NGAWI, WARISAN Rp. 285.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 584 m2/90 m2 di KAB / KOTA NGAWI, WARISAN Rp. 350.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp. 52.200.000**

1. MOTOR, YAMAHA RX-KING SEPEDA MOTOR Tahun 1997, WARISAN Rp. 7.000.000
2. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
3. LAINNYA, --- (SEPEDA) SEPEDA GUNUNG Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 200.000
4. MOBIL, BMW SEDAN Tahun 1992, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000



5. MOTOR, HONDA ASTREA Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp.  
6.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	27.600.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	4.261.338
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.360.961.338
III. HUTANG	Rp.	98.423.976
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.262.537.362

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.